**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia saat ini menjadi semakin pesat dan meluas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang sangat cepat. Dan mengikuti perkembangan itu, isu isu dalam Hubungan Internasional juga menjadi sangat luas. Pada awalnya studi Hubungan Internasional berfokus pada isu-isu *high politics* seperti perang dan ekonomi, tetapi saat ini studi Hubungan Internasional juga sudah dikuasai oleh isu-isu *low politics*, seperti *social* dan *culture.* Berdasar pada realitas tersebut, ilmu Hubungan Internasional berkembang menjadi bidang studi yang ramah dengan berbagai disiplin karena tidak hanya terkotak pada satu isu saja. Perubahan isu global juga membuat dunia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang dirugikan. Dan untuk menghindari menjadi kelompok yang dirugikan, sebagai mahasiswa Hubungan Internasional harus memahami bahwa HI adalah bidang studi yang interdisipliner.[[1]](#footnote-2)

Hubungan Internasional sebagai studi yang interdisipliner membuat HI itu sendiri menjadi ilmu yang dinamis. Hubungan Internasional tidak lagi stagnan pada satu level saja, melainkan akan selalu menemukan perubahan dan terus berkembang. Ilmu studi dalam Hubungan Internasional seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya juga menjadi semakin meluas cakupannya. Dalam bidang ekonomi itu sendiri mencakup beberapa hal, dan salah satu diantaranya adalah industri pariwisata. Oleh karena itu pariwisata menjadi salah satu elemen penting yang bisa dibahas dalam studi Ilmu Hubungan Internasional. Perang Dunia Kedua tidak hanya menegaskan bagaimana kenyataan bahayanya perang negara-negara berkekuatan besar pada saat itu, tetapi juga mengingatkan depresi hebat bagi banyak orang diseluruh dunia dan bagaimana kehidupan ekonomi yang dapat berpengaruh buruk bagi banyak pihak.[[2]](#footnote-3) Dan dapat dilihat bahwa permasalahan pokok dari sejarah HI adalah evolusi sistem negara dan dunia negara-negara kontemporer yang sedang berubah. Dalam hal ini, paling sedikit ada lima nilai dasar sosial yang biasanya diharapakan oleh warga negara untuk dijaga oleh negaranya, yaitu: Keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.[[3]](#footnote-4) Berkaca pada depresi hebat yang dialami oleh masyarakat dunia pasca PD II, yang berpengaruh pada ekonomi maka nilai dasar kesejahteraanlah yang harus ditegakkan. Kesejahteraan dan kekayaan sosial-ekonomi bagi warga negara. Masyarakat mengharapkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang tepat dalam menyediakan banyak lapangan pekerjaan, inflasi yang rendah, investasi yang stabil, pergerakan perdagangan dan komersial yang tidak terganggu dan sebagainya.[[4]](#footnote-5)

Dan untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat tersebut, pemerintah dapat menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilihan tepat. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam usaha memperoleh devisa. Sektor pariwisata adalah komponen industri yang dianggap dapat membantu dalam memberikan pertumbuhan ekonomi ditengah kesulitan yang banyak dialami oleh berbagai negara, selain itu juga pariwisata sebagai salah satu solusi dalam menstimulasi kesempatan kerja dan investasi dengan cepat.[[5]](#footnote-6) Berbicara mengenai pariwisata, sama halnya berbicara mengenai globalisasi. Karena pada dasarnya pariwisata tidak mengenal tingkat batas wilayah.

Perkembangan sektor pariwisata suatu negara tidak bisa lepas dari keadaan dalam negeri itu sendiri. Ketika keadaan dalam negeri suatu negara sedang terguncang dengan adanya berbagai masalah seperti kacaunya situasi politik dalam negeri, terkena bencana alam, adanya serangan teroris, dan permasalahan lain maka hal tersebut tentunya akan mengurangi jumlah kunjungan wisatawan asing yang datang ke negaranya. Untuk dapat memperoleh kembali devisa negara dari sektor pariwisata serta meningkatkan daya saing wisata, maka negara tersebut harus mampu menggairahkan kembali industri pariwisata dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing dengan mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan.[[6]](#footnote-7)

Salah satu bentuk kebijakan yang dirancang pemerintah adalah Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat. Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh suatu negara memang ditunjukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Sejumlah negara bahkan meyakini bahwa hal tersebut adalah suatu keniscayaan. Seperti negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dianggap telah meraih keberhasilan di sektor kepariwisataan antara lain karena penerapan kebijakan tersebut. Kebijakan ini bersifat respirokal sehingga bisa dimaklumi bahwa negara-negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang setara. Sementara, bagi negara-negara miskin tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa.[[7]](#footnote-8) Seseorang yang berminat untuk berkunjung ke negara lain membutuhkan dua dukumen penting, yaitu Paspor dan juga Visa. Visa adalah sebuah dokumen perizinan bagi seseorang untuk tinggal di negara orang lain selama kurun waktu tertentu. Tanpa memilki visa, maka dipastikan tidak bisa tingal di negara lain.[[8]](#footnote-9)

Kebijakan bebas visa Indonesia dalam sejarah perkembangannya mengalami penambahan dan pengurangan terhadap daftar negara penerima fasilitas bebas visa. Pada era Megawati, terdapat 11 negara yang mendapat fasilitas bebas visa. Kebijakan ini dibentuk didalam Keppres No. 18 Tahun 2003. Kemudian pada tahun 2008 diera Susilo Bambang Yudoyono, tercatat 12 negara yang mendapatkan bebas visa, dengan menambahkan Vietnam dan Ekuador dan mengahapus Turki dari daftar negara bebas visa sebelumnya.

Dilanjut pada tahun 2011, masih dibawah pimpinan Presiden SBY, ditambahkan tiga negara lagi yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar. Kedua kebijakan SBY ini tercantum didalam Perpres No. 16 tahun 2008 dan Perpres No. 23 tahun 2011. Dan sekarang dibawah pemerintahan Presiden Jokowi tercatat ada 169 negara yang mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Tahap pertama dengan 30 negara yang mendapatkan fasilitas BVKS, tercatat dalam Perpres No. 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang ditandatangani Presiden pada 9 Juni 2015. Dan tahap II diberlakukan pada tanggal 18 September 2015 dengan ditandatangani Perpres No. 104 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden tahap I, yaitu jumlah negara penerima fasilitas BVKS meningkat menjadi 75 negara. Kemudian ditambahkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya menjadi 84 negara baru yang terdaftar sebagai negara penerima fasilitas BVKS ke Indonesia. Sehingga total negara saat ini yang mendapat fasilitas bebas visa menjadi 169 negara.[[9]](#footnote-10) Dan negara yang paling banyak mendapatkan fasilitas bebas visa ini, hampir sebagian besarnya adalah negara-negara yang berada dikawasan Asia, dan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand dan Malaisya merupakan negara pesaing pariwisata Indonesia.

Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pariwisata dijadikan sebagai sector prioritas dalam lima tahun kedepan. Dan dengan dicetusnya kebijakan bebas visa ini diharapkan dapat mendorong banyak wisatawan mancanegara yang menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah penting untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah dan juga mendorong pertumbuhan sector pariwisata yang selama cenderung tumbuh linear dan tertinggal dari banyak negara, khususnya dikawasan Asia Tenggara. Dan kebijakan bebas visa ini harus diikuti dengan langkah-langkah yang bersifat proaktif dan inovatif untuk dapat meningkatan daya saing wisata khususnya dikawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itu berdasarkan pada uraian tersebut diatas, dalam skripsinya penulis mencoba mengangkat judul **“Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia Terhadap Daya Saing Wisata Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara”**.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarakan pada uraian masalah yang ada, penulis menguraikan kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan dan pelaksanaan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat terkait dengan peningkatan pariwisata Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan daya saing wisata Indonesia khususnya di Kawasan Asia Tenggara?
3. Apakah kebijakan bebas visa Kunjungan Singkat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan daya saing wisata Indonesia khususnya di Kawasan Asia Tenggara?
4. **Pembatasan Masalah**

Agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka dalam penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu pada pengaruh kebijakan bebas visa kunjungan singkat dalam meningkatkan daya saing wisata Indonesia khususnya di Kawasan Asia Tenggara dalam kurun waktu dari tahun 2011 sampai tahun 2016.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas dan dengan memperhatikan rumusan penelitian pembatasan masalah, maka hal yang menjadi kajian penulis yaitu **“Bagaimana pengaruh dari Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat dalam meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia khususnya di Kawasan Asia Tenggara”**.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penbentukan dan pelaksanaan kebijakan bebas visa terkait dengan peningkatan pariwisata Indonesia.
2. Untuk memjelaskan dan menganalisis bagaimana perkembangan daya saing wisata Indonesia khususnya di Kawasan Asia.
3. Untuk mengetahui apa saja pengaruh yang timbul dari kebijakan bebas visa terhadap daya saing wisata Indonesia khususnya di Kawasan Asia.
4. **Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penlitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, diharapkan penelitian ini dapt memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan wisata Indonesia.
2. Untuk menambah wawasan penulis mengenai Kebijakan Bebas Visa dan Pengaruhnya terhadap Daya Saing Wisata Indonesia Dikawasan Asia.
3. Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dan pihak-pihak terkait mengenai peningkatan daya saing wisata Indonesia khususnya di kawasan Asia.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
5. **Kerangka Teoritis**

Teori merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika dan menjadi satubentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah. Sebuah teori menampilkan sebuah sistematis tentang fenomena dengan jalan memberi preposisi-preposisi atau hipotesa-hipotesa yang membahas khusus hubungan diantara beberapa variable agar bisa memaparkan penjelasan dan membuat prediksi mengenai fenomena tersebut.

Dari dua defenisi tersebut, maka untuk menjelaskan pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat terhadap daya saing pariwisata Indonesia Dikawasan Asia Tenggara, penulis menggunakan teori-teori dan konsep-konsep pemikiran sebagai berikut.

Pasca perang dingin isu-isu hubungan internasional tidak lagi hanya focus pada aspek-aspek *high politics* saja, tetapi juga mulai fokus pada aspek *low politics*. Isu-isu hubungan internasional meluas dan mulai menganggap bahwa isu-isu seperti ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan dan terorisme mulai penting untuk dibicarakan. Hal ini dipengaruhi oleh salah satu isu hubungan internasional yang mulai berkembang selama beberapa dekade terakhir yaitu globalisasi.

Dengan adanya globalisasi ini mampu menimbulkan interdepedensi diantara negara-negara dalam berbagi bidang yang menjadikan adanya kerjasama bagi setiap aktor dalam hubungan internasional sehingga kerjasama dapat dilakukan baik secara bilateral dan multilateral. Dengan adanya pengaruh dan peran besar dari globalisasi yang juga menjadikan batas-batas antara negara menjadi semakin semu, sehingga aktifitas suatu negara dapat mempengaruhi masyarakat dinegara lainnya.

Adapun konsep pengaruh itu sendiri menurut **W. J. S. Poerwardaminta** berpendapat bahwa:

**Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain (Poerwardaminta:731).**

Hal ini menjadikan negara-negara saling bersaing untuk menggerakan dan mengembangkan sektor-sektor sumber daya yang mampu memberikan keuntungan bagi negaranya.

Adapun konsep hubungan internasional oleh **Hadi Soesastro** bahwa:

**“Setiap negara pada dasarnya adalah peserta hubungan Internasional, tetapi tidak semua negara sama kadar keterlibatannya di dunia internasional. Intensitas keterlibatan didunia internasional sangat tergantung pada kemampuan, kekuatan, sumber-sumber daya alam yang produktif serta sasaran yang ingin dicapai tidak selamanya dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri tetapi diluar batas-batas wilayah yang mengakibatkan terjadinya interaksi antara negara yang termasuk dalam hubungan internasional**.”**[[10]](#footnote-11)**

Mulai dari Jhon Locke di abad ke-17, melihat potensi yang besar bagi kemajuan manusia di dalam *civil society* dan perekonomian kapitalis modern. Kaum liberal umumnya mengambil pandangan positif tentang sifat manusia. Mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional.

Kaum liberal mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap satu sama lain. Tetapi kaum ini juga percaya bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif, baik itu domestik maupun internasional yang menghasilkan manfaat besar bagi setiap orang baik didalam negeri maupun diluar negeri.[[11]](#footnote-12) Setelah Perang Dunia Kedua, paradigma liberalis dibagi menjadi empat bagian, yaitu liberalis sosiologis, liberalis republikan,liberalis intutisional dan liberalis interdepedensi.[[12]](#footnote-13)

Liberalis interdepedensi menyatakan bahwa tingkat tertingi dalam hubungan internasional antara negara berarti juga tingkat tertinggi dalam interdepedensi.[[13]](#footnote-14) Dan dengan adanya interkasi-interaksi yang menimbulkan kerjasama maka akan tercipta suatu ketergantungan atau dengan kata lain munculnya interdepedensi yang menyebabkan suatu negara dengan negara lainnya akan saling bekerjasama untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya.

Dalam melakukan interaksi dengan negara lain khususnya negara-negara yang menjadi pesaing wisata Indonesia di Kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, maka Indonesia akan berusaha mencapai kepentingan nasionalnya atau dengan kata lain menjalankan politik luar negerinya. Indonesia mencanangkan berbagai bentuk kebijakan dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang mampu meningkatkan perekonomian negara yang tersusun dalam politik luar negerinya.

Kepentingan Nasional adalah perihal yang vital dan dapat menjelaskan mengapa suatu kebijakan luar negeri diambil dan dilakukan sekaligus dapat diungkapkan obyektifitas apa yang menjadi pilihan realitas dari suatu kebijakan politik luar negeri dilakukan.[[14]](#footnote-15) Dan negara merupakan aktor utama dalam memenuhi kepentingan nasional negaranya.

Untuk meningkatkan perekonomian negara tersebut, Indonesia menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain itu pariwisata merupakan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan negera untuk mendorong perekonomian negara yang juga menjadi salah satu kepentingan nasional bagi Indonesia yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu penghasil devisa negara.

Pariwisata menurut **Salah Wahad** (dalam Yoeti, 1982:107):

**“A proposeful human activity that serve as a link between people either within one some country or beyond the geographical limits or state. It involves the temporary displacement of people to other region, country, for the satisfaction of varied needs other than exciting a renumareted function”[[15]](#footnote-16)**

Pariwisata menurut **E. Guyer Fleuer**, mengemukakan:

**“Pariwisata dalam arti modern adalah fenomena dari zaman sekarang yang pada umumnya didasarkan atas kebutuhan, kesehatan dan pergantian hawa. Sedangkan pada khususnya disebakan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industry, perdagangan, serta penyempurnaan dari alat-alat penangankutan**.**”[[16]](#footnote-17)**

Sedangkan menurut **Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan Bab 1 pasal 1** dinyatakan bahwa:

**“Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secra sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.”[[17]](#footnote-18)**

Dan untuk meningkatkan nilai pariwisata Indonesia, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat beberapa program utama dan kegiatan pokok. Salah satunya sebagai berikut:

**“Pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan pokok: pengembangan pasar dan informasi pariwisata; peningkatan promosi pariwisata luar negeri dan dalam negeri; peningkatan pencitraan indonesia; dan peningkatan promosi konvensi, insentif, even dan minat khusus.”**[[18]](#footnote-19)

Adapun konsep kebijakan luar negeri adalah studi manajemen hubungan eksternal dan aktifitas-aktifitas negara-bangsa, seperti yang dibedakan dari kebijaakan dalam negerinya. Kebijakan luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan,arahan, pemahaman, kesepakatan dan sebagainya yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan hubungan internasional dan dengan organisasi internasional serta aktor-aktor non pemerintah. Semua pemerintah nasional dengan fakta keberadaan internasionalnya yang terpisah, diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan luar negeri yang diarahkan pada pemerintah luar negeri dan aktor-aktor internasional lainnya.[[19]](#footnote-20)

Berkaca pada kebijakan-kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya serta melihat keberhasilan dari negara-negara pesaing wisata seperti Malaysia, Singapura, maupun Thailand dalam sektor pariwisata, di tahun 2015 Indonesia mengeluarkan sejumlah paket kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan disektor pariwisata dan memperbaiki kinerja neraca jasa untuk penguatan nilai rupiah. Salah satu paket kebijakannya adalah Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat. Kebijakan Bebas Visa merupakan salah satu cara termudah untuk meningkatkan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat meningkatkan devisa yang diperoleh dari sektor pariwisata. Adapun pengertian Visa dibawah, sebagai berikut.

Visa menurut etimologi berasal dari bahasa Latin yakni carta vīsa yang secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut :

***from Modern Latin charta visa "verified paper," literally "paper that has been seen," past participle of Latin videre "to see" (see).*[[20]](#footnote-21)**

Undang-undang tentang Keimigrasian Indonesia juga memberikan pengertian tentang Visa Republik Indonesia yang disebut visa yaitu keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.[[21]](#footnote-22)

Terdapat beberapa jenis visa serta jangka waktunya yang ditentukan berdasarkan tujuan pemohon visa untuk mengunjungi negara yang dituju. Secara umum penggolongan visa yang dipergunkan dalam lingkup internasional yaitu visa diplomatik yang ditujukan untuk kepentingan diplomatik, visa dinas dan visa biasa. Selain itu terdapat juga jenis visa berdasarkan jangka waktunya yang dapat dipergunakan hanya satu kali pemakaian *(single visa)* dan dengan beberapa kali pemakaian *(multiple visa).* Di dalam penelitian ini hanya akan membahas jenis visa biasa yang ditujukan kepada warga negara asing dengan tujuan wisata ke negara lain.[[22]](#footnote-23)

Menurut **Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks, serta Peneraan Visa dalam Pasal 4** menyebutkan bahwa jenis visa terdiri dari : *Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan, Visa kunjungan singkat, dan Visa tinggal terbatas.*

Dan indonesia menerapkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat yang dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek baik pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha yang diberikakn pada saat kedatangan wisatawan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.[[23]](#footnote-24) Penggunaan visa ini tidak terlepas hubungannya dengan hubungan internasional maupun diplomasi antar negara yang melahirkan kebijakan-kebijakan mengenai visa yang di kenal dalam lingkup Internasional. Didalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 pemerintah telah menetapkan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hingga 20 juta orang pada tahun 2019 guna meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di Kawasan Asia Tenggara.[[24]](#footnote-25)

Adapun salah satu indikator yang umum digunakan untuk membandingkan daya saing kepariwisataan negara-negara di dunia adalah *Travel and Tourim Competitiveness Index* (TTCI)*.* TTCI memiliki tiga subindeks, yaitu: (1) Kerangka kebijakan pemerintah; (2) Infrastruktur dan lingkungan bisnis; (3) Sumber daya manusia, alam, dan budaya.[[25]](#footnote-26)

Dan berpacu pada indikator yang digunakan untuk membandingan daya saing kepariwisataan yang salah satunya yaitu kerangka kebijakan pemerintah, pemerintah Indonesia memberikan bebas visa bagi 15 negara dan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 7,64 juta pada tahun 2011, ditahun 2012 jumlah wisatawan mencapai 8,04 juta, pada tahun 2013 wisatawan mencapai 8,80 juta, sampai pada tahun 2014 jumlah wisatawan mancanegara mencapai 9,43 juta. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang menjadi negara dengan destinasi wisata terbesar di Asia Tenggara. Malaysia menempati peringkat ke Sembilan didunia dengan mendatangkan 24,6 juta wisatawan mancanegara di tahun 2010. Dan Malaysia yang juga pesaing wisata Indonesia ini, dalam rentan waktu 4 tahun dari 2011 sampai 2014 telah membebaskan visa bagi 164 negara dan hal ini telah terbukti mampu meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara hingga 27 juta orang dalam setahun. Dan negara Thailand yang dalam jangka waktu yang sama telah mendatangkan wisatawan mancanegara hingga mencapai 24,77 juta, serta Singapura yang mencapai 15,56 juta wisatawan mancanegara dalam jangka waktu yang sama juga.[[26]](#footnote-27)

Melalui kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat ini pemerintah Indonesia berharap dapat mendorong banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Diharapkan dengan demikian persoalan defisit neraca transaksi yang membuat melemahnya nilai tukar rupiah dapat diatasi. Dan juga kebijakan ini menjadi salah satu langkah yang penting, tidak hanya untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah saja, melainkan juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang selama ini masih cenderung tumbuh linier dan tertinggal dari banyak negara termasuk negara-negara di Kawasan Asia Tenggara.

Jadi asumsi dari peneliti dengan melihat dan memetakan masalah penelitian yang kemudian dikorelasikan dengan kerangka teoritis diatas bahwa:

1. Indonesia merupakan negara yang sektor pariwisatanya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.
2. Tujuan dibentuknya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat adalah untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia yaitu meningkatkan pendapatan devisa negara dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.
3. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat ini juga dapat membantu Indonesia agar dapat bersaing dalam sektor pariwisata dengan negara-negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara.
4. **Hipotesis**

**“Apabila Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia diterapkan dan diberikan bagi banyak negara yang memiliki minat wisata yang tinggi, maka dapat meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di Kawasan Asia Tenggara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.”**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

Sebagaimana telah disebutkan dalam usulan penelitian dan juga dalam hipotesis maka untuk lebih lanjut akan dikemukakan tabel operasional variabel dan indicator.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| **Variabel Bebas:**  Apabila Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat diterapkan dan diberikan bagi banyak negara yang memiliki minat wisata yang tinggi | 1. Keberhasilan negara-negara di Kawasan ASTENG dalam menerapkan Kebijakan Bebas Visa 2. Pariwisata sebagai sektor prioritas dan perlu adanya tindakan yang proaktif dan Inovatif | 1. Mengenai keberhasilan negara-negara di Kawasan ASTENG dalam menerapkan Kebijakan Bebas Visa. (<http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf>) 2. Penjelasan mengenai pariwisata sebagai sektor prioritas dan perlu adanya tindakan yang proaktif dan inovatif.   (<http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf>) |
| **Variabel Terikat:**  Maka dapat meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di Kawasan Asia Tenggara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang ke Indonesia. | 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Pemerintah telah menetapkan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hingga 20 juta orang pada tahun 2019. 2. Adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun 2011-2014 | 1. Penjelasan RPJMN 2015-2019 dimana pemerintah telah menetapkan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hingga 20 juta orang pada tahun 2019.   (<http://beritadaerah.co.id/2015/04/22/empat-kebijakan-pemerintah-dorong-pertumbuhan-pariwisata/>)   1. Mengenai adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.   (<http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf>) |

**4. Skema Kerangka Teoritis**

Indonesia : Sebagai negara yang menerapkan kebijakan Bebas Visa Kunjugan Singkat pada tanggal 9 Juni 2015 dan dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015

Daya saing pariwisata di Kawasan Asia Tenggara: Singapura, Thailand, Malaisya: Negara-negara yang juga menerapkan kebijaakan Bebas Visa

Beberapa negara dikawasan Asia Tenggara juga menetapkan pariwisata sebagai sektor prioritas

Menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas

Kebijakan Bebas Visa untuk menambah jumlah wisatawan mancanegara

Kebijakan Bebas Visa menjadi Output dari politik luar Negeri dalam meningkatkan daya saing pariwisata di Kawasan Asia Tenggara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing.

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Penggunaan Tingkat analisis disini adalah:

Analisa induksionis, yang unit analisanya pada tingkatan yang lebih tinggu. Dimana Kebijakan BVKS merupakan tingkat analisa sistem regional dan global sebagai unit eksplanasi dan Kawasan Asia tenggara merupakan tingkat analisa negara-bangsa sebagai unit analisa.

1. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

*Metode Deskriptif*, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*Fact Finding*), yang kemudian diajukan dengan menganalisa data atau fenomena tersebut untuk mencari solusi dalam kaitan-kaitannya dengan strategi baru. Dengan metode deskriptif ini, peneliti ingin mencari tahu bagaimana pengaruh yang dihasilkan bagi peningkatan daya saing wisata Indonesia dikawasan Asia Tenggara dengan dicetusnya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (Studi Kepustakaan). Bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini dan meneliti langsung ke lapangan. Penelaahan data tersebut didapat juga dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun dari website/internet yang membahas pengaruh dari kebijakan bebas visa*.* Serta teknik wawancara yang akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait untuk memperdalam informasi serta penjelasan mengenai bagaimana Kebijakan BVKS ini dapat meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di Kawasan Asia Tenggara.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi lembaga-lembaga yang peneliti tuju untuk penelitian ini adalah:

* 1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

Alamat: Jl. Banceuy, No. 5

Telepon: (022) 4212834

* 1. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia:

Alamat: KantorGedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta Pusat 10110.

* 1. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan:

Alamat: Jl. Ciembuleuit No. 94, Hegamah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

Telepon: (022) 2032655

* 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung.

1. **Lama Penelitian**

Penelitian dilakukan kurang lebih 6 bulan, terhitung dari bulan desember 2015, yang merupakan tahap awal dari pengumpulan data, dan selesai bulan Juni 2016.

1. **Sistematika Penulisan**

Usulan Proposal ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

**BAB I:** Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan

Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II** Berisi uraian mengenai variabel bebas yaitu mengenai Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat yang dikeluarkan Indonesia bagi negara-negara terpilih yang berikan kebijakan ini.

**BAB III** Berisi uraian tentang variabel terikat yaitu bagaimana perkembangan pariwisata Indonesia dalam meningkatkan daya saing wisata Indonesia di Kawasan Asia Tenggara.

**BAB IV** Berisi analisis pembahasan masalah dan memaparkan hasil penelitian yang diteliti.

**BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian.

1. Rio Alfaj, “Hubungan Internasional Sebagai Bidang Ilmu Interdisipliner”, dalam <http://www.rioalfaj.com/2015/09/hubungan-internasional-sebagai-bidang.html>, di akses 12 februari 2016. [↑](#footnote-ref-2)
2. Robert Jackson dan Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan* (Terjemahan Dadan Suryadipura) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid., hlm 6. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid., hlm. 9. [↑](#footnote-ref-5)
5. “Kebangkitan Industri Pariwisata Singapura Pasca Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)”, dalam <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t5935.pdf>, diakses 12 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid [↑](#footnote-ref-7)
7. Yuni Sudarti “Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis : Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa KunjungN Singkat”, dalam <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf>, diakses diakses 12 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-8)
8. “Pengertian dan Kegunaan Visa”, dalam <http://www.exnim.com/2013/05/pengertian-dan-kegunaan-visa.html>, diakses 19 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-9)
9. Nenden Sekar Arum, “Kebijakan Bebas Visa: Angin Segar Sektor Pariwisata”, *Industri Business Daily* (Online), Jakarta, 1 Januari 2016, dalam <http://industri.bisnis.com/read/20160102/12/506412/kebijakan-bebas-visa-angin-segar-sektor-pariwisata>, diakses 23 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-10)
10. Drs. Teuku May Rudy, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional* (Bandung, 1993), hlm. 99-100. [↑](#footnote-ref-11)
11. Robert Jackson dan Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan* (Terjemahan Dadan Suryadipura) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 175. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid., hlm. 176. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid., hlm. 184. [↑](#footnote-ref-14)
14. Zainuddin Djafar dan Robby Aulia Fadila., *Menuju Peran Strategis Indonesia di Lingkungan Regional dan Global* (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2013), hlm.129. [↑](#footnote-ref-15)
15. Atik Nurani, “Peran Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Ke Indonesia”, Skripsi FISIP-HI UNPAS tidak diterbitkan, 2013, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-18)
18. “Rencana Strategis 2012-2014, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia” dalam <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/RENSTRA_FINAL_all_29juni2012.pdf>, diakses 11 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-19)
19. Robert Jackson dan Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan* (Terjemahan Dadan Suryadipura) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 439. [↑](#footnote-ref-20)
20. “Tinjauan Umum Tentang Visa Dalam Lingkup Internasional” dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf>, diakses 11 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibid. [↑](#footnote-ref-24)
24. “Empat Kebijakan Pemerintah Dorong Pertumbuhan Pariwisata”, dalam <http://beritadaerah.co.id/2015/04/22/empat-kebijakan-pemerintah-dorong-pertumbuhan-pariwisata/> diakses 10 desember 2015. [↑](#footnote-ref-25)
25. “Rencana Strategis 2012-2014, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia” dalam <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/RENSTRA_FINAL_all_29juni2012.pdf>, diakses 11 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-26)
26. Yuni Sudarti “Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis : Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa KunjungN Singkat”, Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol VII No. 06 Tahun 2015 dalam <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf>, diakses diakses 12 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-27)